



Urgensi Penatausahaan Anggaran Pendidikan

Rhoni Rodin, Endang, Jumatul Hidayah, Hamengkubuwono, Muhammad Istan

Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu

Volume 9 Nomor 1

April 2025: 1-34

DOI: 10.30997/jtm.v9i1.16115

Article History

Submission: 17-11-2024

Revised: 27-11-2024

Accepted: 16-01-2025

Published: 29-04-2025

Kata Kunci:

Anggaran Pendidikan;
akuntabilitas; penatausahaan,
pengelolaan keuangan;
transparansi.

Keywords:

*Education Budget; Accountability;
Budget Management; Financial
Management; Transparency.*

Korespondensi:

Rhoni Rodin

082245974078

rhoni.rodin@iaincurup.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penatausahaan anggaran pendidikan sebagai elemen penting dalam mendukung tercapainya pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Dengan fokus pada konteks Indonesia, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan mengkaji dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait pengelolaan anggaran pendidikan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menggambarkan urgensi dan memberikan rekomendasi strategis terkait penatausahaan anggaran pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penatausahaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien memerlukan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Tantangan utama meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Namun, peluang seperti penguatan regulasi, implementasi sistem digital, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rekomendasi utama mencakup reformasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas manajerial, serta pengembangan sistem informasi keuangan berbasis teknologi.

The Urgency of Managing Education Budgets

Abstract: This study aims to examine the urgency of managing education budgets as a critical element in supporting equitable access to education, improving the quality of learning, and ensuring transparent and accountable financial management. Focusing on the context of Indonesia, the study also identifies challenges and opportunities in implementing education budget management. The study employs a qualitative-descriptive approach by analyzing policy documents, legislation, and relevant literature on education budget management. Secondary data collected were analyzed using content analysis methods to highlight the urgency and provide strategic recommendations related to education budget management. The



findings reveal that effective and efficient management of education budgets requires integration between planning, implementation, and monitoring processes. Key challenges include limited human resource capacity, suboptimal use of information technology, and weak oversight of budget utilization. However, opportunities such as strengthening regulations, implementing digital systems, and involving various stakeholders offer strategic solutions to address these issues. Key recommendations include reforming oversight systems, improving managerial capacity, and developing technology-based financial information systems.

PENDAHULUAN

Anggaran pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk dalam pendidikan Islam. Anggaran yang tepat dan dikelola dengan baik dapat memastikan bahwa semua aspek pendidikan, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana hingga biaya operasional, dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Penatausahaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan cara yang optimal.

Penatausahaan anggaran yang baik mencakup beberapa aspek krusial: pertama, Transparansi: Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan transparansi agar semua pihak terkait dapat memantau dan menilai penggunaan dana. Transparansi ini

mencakup pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai alokasi dan realisasi anggaran. Dalam konteks pendidikan Islam, transparansi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam ajaran Islam. Anggaran pendidikan harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif. Juga diperkuat pendapat lain bahwa Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan membantu meminimalkan risiko korupsi dan memastikan bahwa dana pendidikan digunakan untuk kepentingan utama, yaitu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan (Sukatin et al., 2023).

Pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD, memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal (Sentryo, 2017).

Kedua, Akuntabilitas: Setiap penggunaan dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, akuntabilitas merupakan bagian dari etika dan prinsip pengelolaan yang baik, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Kholik, *et al.*, 2022; Fauziah, Maryani, & Wulandari, 2019; Indra, *et al.*, 2024). Pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan efisien. Hal ini sangat penting

untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan berkelanjutan.

Ketiga, Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cara yang efisien, yaitu memaksimalkan manfaat dari setiap unit dana yang digunakan. Efektivitas juga penting untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, efisiensi dan efektivitas mencerminkan prinsip manajemen yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, efisiensi anggaran tidak hanya mencakup penggunaan dana yang optimal, tetapi juga memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, mencakup sarana, prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Anggaran pendidikan mencakup beberapa komponen utama, yang masing-masing berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana, gaji tenaga pendidik, dan biaya operasional (Sudarmono *et al.*, 2021). Pertama, Pengadaan Sarana dan

Prasarana: Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana meliputi pembelian dan pemeliharaan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan dasar untuk pelaksanaan pendidikan yang efektif (Ulfah, Maryani, & Indra, 2024). Dalam pendidikan Islam, sarana harus mendukung pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai Islam serta memenuhi kebutuhan pendidikan kontemporer.

Kemudian, Kedua, Gaji Tenaga Pendidik: Gaji tenaga pendidik merupakan komponen penting dalam anggaran pendidikan. Tenaga pendidik yang berkualitas dan berkomitmen sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Gaji yang layak dan tepat waktu dapat memotivasi tenaga pendidik untuk memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran. "Pengelolaan anggaran pendidikan yang baik tidak hanya melibatkan alokasi dana untuk sarana dan prasarana, tetapi juga memerlukan perhatian pada pengeluaran untuk

pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya, ketiga, Biaya Operasional: Biaya operasional mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari dalam proses pendidikan, termasuk biaya administrasi, pelatihan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen biaya operasional yang baik memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Anggaran pendidikan merupakan elemen penting dalam meraih tujuan pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Penatausahaan anggaran yang baik, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa semua komponen pendidikan—mulai dari sarana dan prasarana hingga gaji tenaga pendidik dan biaya operasional—dapat terlaksana dengan optimal, mendukung

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang menjadi landasan penting dalam pengalokasian anggaran pendidikan di Indonesia. Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Penatausahaan anggaran dalam konteks ini sangat krusial karena dengan pengelolaan yang baik, anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan seperti pengembangan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pelaksanaan berbagai program yang mendukung kualitas pendidikan. Penatausahaan yang baik mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran

secara berkala, memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penatausahaan anggaran pendidikan harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk mencapai hasil yang maksimal. Evaluasi yang berkala dapat membantu memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Olga & Nurraihan, 2024).

Salah satu tujuan dari ketentuan alokasi anggaran tersebut adalah untuk meminimalkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan mutu pengajaran dengan menyediakan pelatihan bagi guru serta pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan anggaran yang dikelola secara efisien, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing ditingkat global. Anggaran pendidikan yang memadai dan pengelolaan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan prinsip

tata kelola yang baik dalam penatausahaan anggaran pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal dan efektif.

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini sering kali terletak pada penyerapan anggaran yang lambat dan tidak merata, kurangnya pengawasan yang ketat, serta potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya sekedar dialokasikan, tetapi juga digunakan dengan maksimal dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.

Dalam konteks global, alokasi anggaran pendidikan ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 4 yang menekankan pada pendidikan berkualitas untuk semua, sehingga anggaran yang mencukupi dan pengelolaan yang baik merupakan prasyarat penting untuk mencapainya

(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020).

Kualitas pengelolaan anggaran pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sistem perencanaan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat meningkatkan hasil pendidikan secara signifikan (Habibatulloh et al., 2022). Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan. Kualitas pengelolaan anggaran memang ditentukan oleh beberapa faktor kunci, seperti sistem perencanaan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan akuntabilitas yang kuat. Sistem perencanaan yang baik memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pendidikan, sedangkan pengawasan yang ketat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Akuntabilitas, di sisi lain, mendorong transparansi sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat meningkatkan hasil pendidikan secara signifikan sangatlah masuk akal (Irawati & Susetyo, 2017). Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan, yang apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Namun, keberhasilan implementasi ini juga bergantung pada bagaimana setiap pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, daerah, maupun satuan pendidikan, menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas.

Tantangan seperti ketidakcukupan anggaran di beberapa daerah, korupsi, dan lemahnya pengawasan masih menjadi masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran memerlukan upaya yang konsisten untuk memperkuat tata kelola, melibatkan partisipasi publik, dan meningkatkan

kapasitas pengelola anggaran di setiap tingkat.

Pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk memastikan alokasi dan penggunaan dana yang tepat. Studi ini mengidentifikasi sejumlah masalah dalam penatausahaan anggaran yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ketika semua pihak—seperti pemerintah, sekolah, komite pendidikan, dan masyarakat—terlibat dalam proses alokasi dan penggunaan dana, transparansi dan akuntabilitas lebih mudah dijaga. Partisipasi ini memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan penggunaannya tepat sasaran untuk mendukung proses pendidikan.

Studi yang mengidentifikasi masalah dalam penatausahaan anggaran menggarisbawahi berbagai kendala yang masih sering dihadapi. Masalah-masalah ini bisa berkisar dari perencanaan yang kurang matang,

kurangnya pengawasan, hingga penyalahgunaan dana, seperti korupsi. Tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan karena anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas, gaji guru, dan operasional pendidikan, tidak digunakan secara maksimal (Purba et al., 2024).

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran anggaran, serta dorongan untuk terus melibatkan semua pihak dalam proses penatausahaan anggaran, sangat penting agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep penatausahaan anggaran pendidikan?; 2) Apa saja komponen

yang termasuk dalam anggaran pendidikan?; 3) Bagaimana prosedur penatausahaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *library research* untuk menganalisis urgensi penatausahaan anggaran pendidikan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendidikan.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, mengungkapkan hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan anggaran pendidikan, serta menggambarkan tantangan dan peluang yang ada.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya

penatausahaan anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa depan.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Penatausahaan Anggaran

Pendidikan

1. Definisi Penatausahaan Anggaran

Penatausahaan anggaran pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran yang dirancang untuk mendukung kegiatan pendidikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan dikelola dengan efektif dan efisien, serta digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pendidikan (Sukatin et al., 2023).

Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan, penatausahaan anggaran pendidikan adalah "proses manajerial yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan

anggaran, pengalokasian anggaran, penggunaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga evaluasi pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran (Riyanik et al., 2024).

Penatausahaan anggaran pendidikan ini mencakup beberapa komponen kunci:

- 1) Perencanaan Anggaran: Menentukan kebutuhan anggaran berdasarkan rencana strategis pendidikan, termasuk estimasi biaya untuk berbagai kegiatan dan fasilitas pendidikan. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan proyeksi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Pengalokasian Anggaran: Mendistribusikan dana yang tersedia sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pengalokasian harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi untuk memastikan bahwa semua sektor pendidikan mendapatkan dana

yang sesuai dengan kebutuhannya.

- 3) Penggunaan Anggaran: Implementasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Ini melibatkan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti pengadaan sarana dan prasarana, gaji tenaga pendidik, dan biaya operasional.
- 4) Pelaporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran. Pelaporan ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk evaluasi oleh pihak-pihak terkait.
- 5) Evaluasi Pengelolaan Anggaran: Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang digunakan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam proses penatausahaan anggaran (Adriansyah & Maftuhah, 2023).

2. Prinsip Penatausahaan Anggaran

Penatausahaan anggaran pendidikan memerlukan penerapan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan pengelolaan dana yang optimal dan efektif. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan cara yang paling produktif dan bertanggung jawab. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam penatausahaan anggaran pendidikan (Rahmah, 2016):

- a. Efisiensi. Prinsip efisiensi menekankan penggunaan dana secara optimal dengan memaksimalkan output sambil meminimalkan biaya. Ini berarti bahwa anggaran yang dialokasikan harus digunakan dengan cara yang menghasilkan hasil yang terbaik tanpa pemborosan. Dalam konteks pendidikan, efisiensi dapat tercermin dalam pengadaan sarana dan prasarana yang hemat biaya namun berkualitas, serta pelaksanaan program pendidikan yang menghasilkan hasil belajar yang diinginkan dengan biaya

yang wajar. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan hasil yang maksimal dan mengurangi pemborosan.

- b. Efektivitas.** Efektivitas mengacu pada sejauh mana dana yang digunakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa anggaran yang dikeluarkan harus mampu mendukung pencapaian hasil pendidikan yang telah direncanakan, seperti peningkatan kualitas pengajaran, pencapaian target akademik, dan pengembangan kompetensi siswa. Penggunaan anggaran harus efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, yang mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa.
- c. Transparansi.** Transparansi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan terbuka dan dapat diakses

untuk audit dan pengawasan. Ini berarti bahwa informasi mengenai penggunaan dana harus tersedia dan dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Transparansi dalam penatausahaan anggaran pendidikan menciptakan akuntabilitas dan memfasilitasi pengawasan publik yang efektif.

- d. Akuntabilitas.** Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang menerima dan menggunakan dana pendidikan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Mereka harus dapat memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai bagaimana dana digunakan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjamin bahwa dana yang diterima dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Komponen Anggaran Pendidikan

Dalam pengelolaan anggaran pendidikan, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Setiap komponen berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas dan efektivitas pendidikan. Berikut adalah komponen-komponen anggaran pendidikan yang penting:

1) Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik. Gaji dan tunjangan tenaga pendidik merupakan komponen terbesar dari anggaran pendidikan. Ini mencakup semua pembayaran yang diberikan kepada guru, dosen, dan staf pendidikan lainnya sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Komponen ini sangat penting karena kesejahteraan tenaga pendidik mempengaruhi kualitas pengajaran dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Gaji dan tunjangan tenaga pendidik adalah komponen kunci

dalam anggaran pendidikan yang mempengaruhi kualitas pengajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Pengadaan sarana dan prasarana meliputi pembangunan gedung sekolah, fasilitas laboratorium, perpustakaan, serta perangkat teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. Investasi dalam sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung kebutuhan pendidikan yang berkembang. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai adalah investasi jangka panjang untuk mendukung kualitas pendidikan dan memberikan fasilitas belajar yang optimal.

3) Biaya Operasional Pendidikan.

Biaya operasional pendidikan mencakup berbagai pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan sekolah sehari-hari, seperti biaya listrik, air, internet, dan bahan ajar. Biaya operasional

ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Biaya operasional pendidikan mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjaga kelancaran proses pendidikan dan operasional sekolah.

- 4) Program Pengembangan Profesi Guru. Program pengembangan profesi guru meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Program pengembangan profesi guru adalah investasi penting dalam peningkatan kualitas pengajaran dan profesionalisme tenaga pendidik.
- 5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk

mendukung kegiatan operasional di sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar dan menengah. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan operasional, termasuk pembelian bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kebutuhan sehari-hari sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana vital yang membantu sekolah dalam menjalankan operasional dan kegiatan belajar mengajar sehari-hari (Sudarmono et al., 2021).

Prosedur Penatausahaan Anggaran Pendidikan

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran pendidikan merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa sumber daya finansial dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang merupakan dokumen strategis yang menguraikan rencana kegiatan sekolah serta anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan

kegiatan tersebut (Anugraheni Puspita, 2023).

a) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS adalah dokumen perencanaan yang mengintegrasikan semua aspek kegiatan sekolah dengan anggaran yang diperlukan untuk mendukungnya. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Tujuan utama RKAS adalah untuk merencanakan dan mengelola dana pendidikan dengan cara yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Dwi Diantari et al., 2024).

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) melibatkan partisipasi berbagai pihak untuk mencerminkan prioritas kebutuhan pendidikan

dan memastikan kesesuaian dengan standar nasional.

b) Partisipasi dalam Penyusunan RKAS

Proses penyusunan RKAS tidak hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, tetapi juga melibatkan komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa dan anggota masyarakat setempat. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan yang diidentifikasi mencerminkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Partisipasi aktif dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menyusun RKAS yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang mendasar (Anugraheni Puspita, 2023).

c) Penyesuaian dengan Standar Nasional

RKAS harus disusun dengan memperhatikan standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup pedoman untuk alokasi dana, prioritas pengeluaran, dan pencapaian tujuan pendidikan. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal tetapi juga selaras dengan kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas. RKAS harus mencerminkan prioritas kebutuhan pendidikan sesuai dengan standar nasional untuk memastikan keselarasan antara kebijakan lokal dan nasional (Adriansyah & Maftuhah, 2023).

d) Implementasi dan Pengawasan

Setelah RKAS disusun dan disetujui, tahap berikutnya adalah implementasi dan pengawasan. Anggaran harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pengawasan yang efektif termasuk monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan efisien. Pengawasan yang efektif terhadap implementasi RKAS sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan pendidikan tercapai dengan optimal (Waruwu et al., 2024).

Dengan proses perencanaan yang sistematis, partisipasi yang luas, dan penyesuaian dengan standar nasional, anggaran pendidikan dapat dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

2. Pengalokasian Anggaran

Pengalokasian anggaran pendidikan adalah langkah penting dalam proses manajerial anggaran yang memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas kebutuhan

pendidikan. Proses ini melibatkan penentuan dan distribusi dana untuk berbagai komponen pendidikan, seperti gaji tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta biaya operasional. Pengalokasian anggaran dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan mendapatkan dana yang memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengalokasian anggaran pendidikan dimulai dengan penetapan anggaran tahunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk menentukan alokasi dana berdasarkan prioritas kebutuhan pendidikan yang telah diidentifikasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, seperti kebutuhan sekolah, kondisi sarana dan prasarana, serta jumlah tenaga pendidik. Pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk

memastikan dana dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan (Mujayaroh & Rohmat, 2020).

3. Distribusi Dana dalam APBN dan APBD

Setelah anggaran tahunan ditetapkan, dana pendidikan dibagi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan yang bersifat nasional, seperti program-program pendidikan yang dilaksanakan di seluruh negeri dan pembangunan infrastruktur pendidikan besar. Sementara itu, APBD mencakup dana untuk kebutuhan lokal, seperti perbaikan fasilitas pendidikan di tingkat daerah dan dukungan operasional bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Distribusi dana pendidikan ke dalam APBN dan APBD dilakukan untuk memastikan bahwa baik kebutuhan pendidikan nasional maupun lokal dapat terpenuhi dengan baik (Utomo, 2024).

4. Kriteria Penentuan Prioritas Kebutuhan

Prioritas kebutuhan pendidikan ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk data statistik tentang prestasi pendidikan, kondisi fasilitas pendidikan, dan kebutuhan khusus di daerah-daerah yang kurang berkembang. Kriteria ini membantu dalam memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mengatasi masalah utama dalam pendidikan dan mendukung program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Penentuan prioritas kebutuhan pendidikan didasarkan pada analisis data dan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan alokasi anggaran yang efektif (Bahrudin et al., 2021).

5. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran

Setelah dana dialokasikan, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Proses ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang

telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan audit internal dan eksternal serta laporan penggunaan anggaran yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap penggunaan anggaran penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Ayu et al., 2024).

Pengalokasian anggaran pendidikan yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan yang matang, kerjasama antar lembaga, dan pemantauan yang ketat. Dengan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan dan pengalokasian, serta pengawasan yang cermat, dana pendidikan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran pendidikan merupakan fase kritis dalam siklus pengelolaan anggaran yang melibatkan penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk keperluan pendidikan. Proses ini mencakup

pencairan dana, penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta pemantauan dan pengawasan oleh badan-badan terkait. Setiap tahap pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

1) Pencairan Dana

Pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah dilakukan setelah anggaran disetujui dan alokasi dana ditetapkan. Proses ini melibatkan pengiriman dana ke rekening satuan pendidikan atau lembaga yang berwenang. Pencairan dana harus sesuai dengan ketentuan dalam RKAS yang telah disusun dan disetujui, serta mematuhi prosedur administratif yang berlaku. Pencairan dana pendidikan harus dilakukan sesuai dengan RKAS dan ketentuan administratif yang berlaku untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran (Suwandi, 2022).

2) Penggunaan Dana

Penggunaan dana harus mengikuti rencana yang telah disusun dalam RKAS. Setiap pengeluaran dana harus didokumentasikan dengan baik, mulai dari pembelian sarana dan prasarana, pembayaran gaji tenaga pendidik, hingga biaya operasional lainnya. Penggunaan dana juga harus disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari anggaran yang telah disetujui. Penggunaan dana pendidikan harus sesuai dengan RKAS dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi (Sismono, 2020).

3) Pengawasan dan Audit

Pengawasan dan audit merupakan bagian penting dari pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan rencana. Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan auditor internal melakukan audit rutin untuk memeriksa penggunaan dana dan

memastikan tidak adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian. Hasil audit ini digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan anggaran di masa depan. Pengawasan dan audit oleh BPK memastikan penggunaan dana pendidikan sesuai dengan ketentuan dan membantu mencegah penyimpangan (Anastasia Elizabeth Budiarto, 2024).

4) Laporan dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan anggaran, laporan penggunaan dana harus disusun dan diajukan kepada pihak yang berwenang. Laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan penggunaan dana, serta evaluasi terhadap pencapaian target dan efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana telah digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk merencanakan perbaikan di masa mendatang. Laporan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan merencanakan perbaikan yang

diperlukan (Mujayaroh & Rohmat, 2020).

Pelaksanaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan pencairan dana, penggunaan sesuai dengan RKAS, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan

Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan anggaran pendidikan yang penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penyusunan laporan penggunaan anggaran, evaluasi terhadap pencapaian hasil, serta audit oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

1) Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan penggunaan anggaran setelah dana digunakan. Laporan ini harus mencakup rincian mengenai alokasi dan pengeluaran dana sesuai dengan RKAS yang telah disusun. Laporan tersebut harus menyajikan informasi yang akurat mengenai penggunaan dana, mencakup semua aspek dari gaji tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, hingga biaya operasional. Penyusunan laporan penggunaan anggaran yang akurat dan detail adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan (Turambi et al., 2024).

2) Pengajuan Laporan kepada Pemerintah Daerah

Setelah laporan penggunaan anggaran disusun, laporan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah daerah untuk tinjauan dan verifikasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian penggunaan dana dengan RKAS dan memastikan

bahwa alokasi anggaran telah digunakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pengajuan laporan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah adalah langkah penting untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan kepatuhan terhadap rencana yang telah disetujui (Utami et al., 2016).

3) Audit oleh Lembaga Terkait

Audit dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau auditor internal, untuk memeriksa dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan dan RKAS. Proses audit mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi transaksi, dan penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Hasil audit digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan anggaran di masa depan. Audit oleh lembaga terkait berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan untuk mengidentifikasi area yang

memerlukan perbaikan (Berliani et al., 2024).

4) Evaluasi Hasil Penggunaan Anggaran

Evaluasi hasil penggunaan anggaran merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai aspek yang harus dianalisis secara mendalam untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

a) Penilaian Terhadap Pencapaian Target. Penilaian terhadap pencapaian target merupakan bagian utama dari evaluasi anggaran. Ini melibatkan pemeriksaan sejauh mana dana yang telah digunakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Setiap aktivitas atau proyek yang didanai harus memiliki indikator pencapaian yang jelas, seperti

peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, atau hasil belajar siswa. Evaluasi ini memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Penilaian pencapaian target dalam penggunaan anggaran pendidikan sangat penting untuk menentukan sejauh mana dana tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan

b) Efektivitas Penggunaan Dana. Efektivitas penggunaan dana mencakup analisis tentang bagaimana dana yang dialokasikan telah digunakan dalam praktik. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap apakah dana tersebut telah mengarah pada hasil yang diinginkan dan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan rencana. Efektivitas juga mencakup penilaian terhadap efisiensi pengeluaran, yaitu apakah hasil yang diperoleh

sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang paling produktif dan bermanfaat. Evaluasi efektivitas penggunaan dana membantu memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan menghasilkan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

- c) Dampak Pengeluaran Anggaran Terhadap Kualitas Pendidikan. Evaluasi dampak dari pengeluaran anggaran berfokus pada bagaimana dana yang digunakan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini termasuk penilaian terhadap perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek pendidikan seperti kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, serta kondisi sarana dan prasarana. Dampak ini dapat diukur melalui berbagai metode, seperti survei kepuasan siswa dan guru, analisis hasil ujian, dan observasi langsung terhadap

kondisi pendidikan di sekolah. Mengukur dampak dari pengeluaran anggaran terhadap kualitas pendidikan penting untuk menentukan sejauh mana investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi proses pendidikan.

- d) Perencanaan Perbaikan dan Penyesuaian Anggaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan perbaikan dan penyesuaian anggaran di masa depan. Jika ditemukan bahwa penggunaan anggaran tidak mencapai target yang diinginkan atau ada area yang perlu diperbaiki, langkah-langkah perbaikan harus direncanakan dan diimplementasikan. Penyesuaian anggaran juga diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan baru atau mengatasi masalah yang diidentifikasi selama proses evaluasi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang akan datang dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Hasil evaluasi

harus digunakan untuk merencanakan perbaikan dan penyesuaian anggaran di masa depan agar pengelolaan anggaran semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan (Rahayuningsih, 2021).

Evaluasi hasil penggunaan anggaran adalah proses penting untuk menilai keberhasilan penggunaan dana pendidikan dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian target, efektivitas penggunaan dana, dan dampak terhadap kualitas pendidikan, serta perencanaan perbaikan dan penyesuaian anggaran untuk masa depan. Evaluasi hasil penggunaan anggaran membantu dalam menilai pencapaian tujuan dan memberikan dasar untuk perbaikan dan penyesuaian anggaran di masa depan (Dewi et al., 2024).

Pelaporan dan evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat dan efektif. Proses ini membantu

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pendidikan, serta memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran.

Pembahasan

Tantangan dalam Penatausahaan Anggaran Pendidikan

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan merupakan tantangan yang signifikan di berbagai wilayah. Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab dalam memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya kedua aspek ini dapat mengakibatkan penyimpangan, ketidaksesuaian antara alokasi dan penggunaan dana, serta pengurangan efektivitas program pendidikan.

a) Kurangnya Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan mencakup keterbukaan mengenai bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Masalah ini sering muncul ketika proses penganggaran tidak melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terbuka atau ketika informasi terkait pengeluaran tidak tersedia untuk publik.

Menurut penelitian terbaru, kurangnya transparansi di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah sering kali terjadi karena minimnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara alokasi dana dan kebutuhan nyata di lapangan (Viktoria, 2015).

b) Kurangnya Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pengguna anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan. Namun, sering terjadi masalah seperti penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan yang dilaporkan, serta pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan anggaran.

Penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya audit internal dan eksternal yang memadai. Tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan anggaran menjadi lebih mungkin terjadi, yang dapat mengurangi efektivitas program pendidikan di berbagai daerah. Akuntabilitas yang lemah dalam pengelolaan anggaran pendidikan mengakibatkan potensi penyalahgunaan dana dan pelaporan yang tidak akurat (Habibatulloh et al., 2022).

c) Dampak Kurangnya
Transparansi dan Akuntabilitas

Ketika transparansi dan akuntabilitas tidak ditegakkan, dampak negatifnya sangat jelas, seperti: 1) Penyalahgunaan Dana: Alokasi anggaran yang tidak tepat dapat mengakibatkan dana tidak digunakan sesuai kebutuhan, misalnya untuk pengadaan fasilitas atau pelatihan guru; 2) Menurunnya Kualitas Pendidikan: Ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima siswa, dengan kurangnya sumber daya yang mendukung proses belajar mengajar; dan 3) Menurunnya Kepercayaan Publik: Kurangnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga

mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan (Habibatulloh et al., 2022).

2. Ketidacukupan Anggaran

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang signifikan, banyak satuan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi tantangan serius terkait ketidacukupan dana (Ayudhia Nur Luthfia et al., 2023). Dalam beberapa kasus, anggaran yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar institusi pendidikan, seperti penyediaan fasilitas, pengadaan sarana belajar, dan kesejahteraan tenaga pendidik.

a) Tantangan dalam Distribusi dan Alokasi

Meskipun anggaran pendidikan di Indonesia telah ditetapkan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, distribusi dana sering kali tidak merata. Beberapa sekolah di perkotaan mendapatkan fasilitas yang lebih memadai, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil

masih kesulitan menyediakan kebutuhan dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat-alat peraga pendidikan. Satuan pendidikan di daerah terpencil masih menghadapi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan meski anggaran pendidikan telah ditingkatkan, hal ini menunjukkan distribusi anggaran yang belum sepenuhnya merata (Nadhifa Ardiana Maharani et al., 2024).

b) Ketidacukupan untuk Pembiayaan Sarana dan Prasarana

Komponen anggaran terbesar dalam pendidikan adalah gaji dan tunjangan tenaga pendidik, sehingga sisa dana untuk perbaikan sarana dan prasarana sering kali terbatas. Beberapa sekolah tidak mampu membangun fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, atau ruang kelas yang nyaman, yang pada akhirnya mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian menyatakan bahwa meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersedia, penggunaannya sering kali hanya

mencakup kebutuhan operasional dasar, sementara pengembangan fasilitas pendidikan masih terabaikan. Keterbatasan anggaran membuat sekolah-sekolah hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional dasar, sementara pengembangan fasilitas pendidikan belum menjadi prioritas (Latifah et al., 2020).

c) Pembiayaan untuk Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Selain sarana, kesejahteraan tenaga pendidik juga masih menjadi masalah, terutama di sekolah-sekolah dengan status non-negeri atau yang berlokasi di daerah terpencil. Keterbatasan anggaran membuat tunjangan atau insentif bagi guru sering kali tidak mencukupi, sehingga berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja mereka dalam mengajar. Gaji dan tunjangan yang terbatas menjadi kendala bagi tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil, yang berpengaruh pada kinerja mereka dalam memberikan pendidikan berkualitas (Anwar, 2022).

d) Dampak Ketidacukupan Anggaran terhadap Mutu Pendidikan

Ketidacukupan anggaran berakibat pada terbatasnya peningkatan kualitas pendidikan. Proses belajar mengajar yang ideal membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, bahan ajar yang lengkap, serta tenaga pengajar yang berkualitas dan sejahtera. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka tujuan pendidikan yang diharapkan, termasuk peningkatan kompetensi peserta didik, tidak dapat tercapai secara optimal. Anggaran pendidikan yang tidak mencukupi berdampak langsung pada kualitas pendidikan, yang terlihat dari terbatasnya fasilitas belajar dan kesejahteraan tenaga pengajar (Shaleha & Panggabean, 2022).

e) Solusi untuk Mengatasi Ketidacukupan Anggaran

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dan masyarakat. Penguatan kebijakan

anggaran yang lebih adil dan efektif, disertai dengan upaya untuk memaksimalkan dana yang ada, sangat penting. Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan bantuan dari organisasi non-pemerintah juga dapat membantu mencukupi kekurangan dana di sekolah-sekolah tertentu. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menutup kekurangan anggaran pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal (Nasution & Marthalina, 2018).

2. **Korupsi dan Penyalahgunaan Dana**

Kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan merupakan salah satu tantangan serius yang menghambat kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Elvira, 2021). Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya alokasi

dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan pelayanan pendidikan secara umum.

1) Skala Penyalahgunaan Dana Pendidikan

Korupsi dan penyalahgunaan dana dalam sektor pendidikan sering terjadi pada berbagai level, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Misalnya, alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kerap kali tidak sampai pada satuan pendidikan secara utuh. Sebagian dana tersebut dialihkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Arti & Rizky, 2023). Penyalahgunaan dana pendidikan terjadi secara sistemik di berbagai tingkatan, sehingga alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sepenuhnya sampai kepada penerima manfaat di satuan pendidikan.

2) Dampak Korupsi terhadap Kualitas Pendidikan

Korupsi berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan fasilitas sekolah, keterbatasan dalam penyediaan buku dan bahan ajar, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru (Handoyo & Susanti, 2014). Keterbatasan ini kemudian mengakibatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik menjadi tidak optimal. Guru dan tenaga pendidik juga menjadi pihak yang terdampak, di mana mereka sering kali tidak mendapatkan hak-hak finansial yang layak, seperti tunjangan atau insentif yang sesuai. Korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan berdampak signifikan terhadap kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

3) Penegakan Hukum dan Pengawasan yang Lemah

Salah satu penyebab utama maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran

pendidikan adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Banyak kasus penyalahgunaan dana yang tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum (Naufal Ridha et al., 2022). Minimnya pengawasan dan ketidaktransparanan dalam pelaporan anggaran juga mempermudah terjadinya korupsi di sektor ini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya penyalahgunaan dana pendidikan, yang berdampak buruk pada pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

4) Solusi: Peningkatan Transparansi dan Pengawasan

Untuk mengatasi masalah korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, perlu dilakukan peningkatan transparansi dalam pelaporan dan penggunaan dana pendidikan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem audit anggaran secara berkala

dan melibatkan masyarakat serta lembaga independen dalam pengawasan (Hasan & Junesco, 2024). Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi perlu diterapkan sebagai langkah preventif. Peningkatan transparansi, audit berkala, dan partisipasi publik dalam pengawasan dana pendidikan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

SIMPULAN

Penatausahaan anggaran pendidikan yang efektif merupakan kunci dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan yang matang, pengalokasian dana sesuai dengan prioritas kebutuhan, pelaksanaan yang konsisten dengan rencana anggaran, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dalam perencanaan, anggaran harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah,

sekolah, dan komite pendidikan, untuk memastikan bahwa prioritas kebutuhan sekolah tercermin dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pengalokasian dana kemudian dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, seperti pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji guru, serta biaya operasional.

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam penatausahaan anggaran pendidikan. Masalah ketidakcukupan dana sering kali menjadi hambatan utama, di mana satuan pendidikan merasa bahwa alokasi yang diterima belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan pendidikan. Di sisi lain, tantangan transparansi dalam pengelolaan anggaran sering kali menimbulkan masalah, termasuk adanya penyalahgunaan dana atau korupsi yang berdampak pada kualitas pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk memperkuat prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menjadi solusi dalam memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, sehingga dapat menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berperan penting secara langsung maupun tak langsung dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1-24. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>

- Anastasia Elizabeth Budianto. (2024). PENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH KORUPSI DANA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI. *Sindoro: Cendekia Pendidikan*, 7(6), 11-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.9644/sindoro.v7i6.6447>
- Anugraheni Puspita. (2023). Perencanaan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di SMA Negeri 13 Surabaya. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 177-186. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1396>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1-15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135-149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- Ayu, D. M., Girindratta, R., Nurfadillah, N., Fariz, F., & Mashur, M. Al. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah Untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1596-1603.
- Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahidyyah, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36-46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>
- Bahrudin, B., Jaya, I., & Kustandi, C. (2021). Kebutuhan layanan pendidikan khusus di sekolah dasar. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 78-87. <https://doi.org/10.29210/02021829>
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. 7(2).
- Dewi, A. F. K., Khasanah, D. Z. N., Andari, S., Puspitasari, R. E., & Susanto, B. H. (2024). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pengelolaan Biaya Pendidikan. 1(4), 138-145.
- Dwi Diantari, S., Sint Oida Bani, M., Al Fatiqh, S., Trihantoyo, S., Lidah Wetan, J., Wetan, L., Lakarsantri, K., Surabaya, kota, & Timur, J. (2024). Pengoperasian Aplikasi RKAS Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 280-299. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.370>
- Elvira. (2021). Birokrasi dan Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2015 Bureaucracy and Corruption in the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) in the Re. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16(1), 22-27.

- Fauziah, R. P., Maryani, N., & Wulandari, R. W. (2019). Pelaksanaan model pendidikan karakter di Sekolah Dasar. *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(2), 139-154.
- Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan Di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang Terakreditasi A, B, Dan C. *The Manager Review*, 4(1), 129-154. <https://doi.org/10.33369/tmr.v4i1.25835>
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta. *Abdimas*, 18(1), 19-26.
- Hasan, Z., & Junesco, D. (2024). Upaya Sekolah dalam Mencegah Praktik Korupsi di Dunia Pendidikan. 4.
- Indra, S., Maryani, N., Latifah, Z. K., Adri, H. T., & Habibi, F. (2024). Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi Thinglink Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa. *Tadbir Muwahhid*, 8(2), 259-267.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan persepsi dosen dan mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738-748.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Tujuan 4: Memastikan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua. *Komisi Hak Asasi Manusia*, 1, 1-10. <https://sdg.komnasham.go.id>
- Latifah, Eri Purwanti, & Nurhadi Kusuma. (2020). PERAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI MTs NEGERI 2 PRINGSEWU KECAMATAN BANYUMAS. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 2(1), 9-15. <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v2i1.22>
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41-54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Nadhifa Ardiana Maharani, Fitri Hidayah, Diki Darmawan, & Syunu Trihantoyo. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25-39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender. *JE & KP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 145-162.

- Naufal Ridha, F., Komarasari, F., Damayanti, I., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 38–50. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/6639>
- Olga, L., & Nurraihan, F. (2024). Manajemen Finansial Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 9(1), 113–128. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v9i1.1157
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah. *Nizhamiyah*, 14(1), 64. <https://doi.org/10.30821/niz.v14i1.3239>
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 73–77. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>
- Riyanik, Wuryandini, E., & Nurkolis. (2024). Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SDIT Al Manan Boyolali. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 2823–2834.
- Sentryo, I. (2017). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dasar. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar Yang Berkualitas*, 1, 180–191.
- Shaleha, K., & Panggabean, D. S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di SD Siburur Kabupaten Tapanuli. *Edumaniora*, 1(1), 35–46. <https://journal.cdfpublisher.org/index.php/edumaniora/article/view/10%0Ahttps://journal.cdfpublisher.org/index.php/edumaniora/article/download/10/9>
- Sismono, H. (2020). Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Gaji Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorer Sd Negeri 4 *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat ...*, 5(1). <https://www.ojs.ummetro.ac.id/index.php/lentera/article/view/1253>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. In *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan (Vol. 3, Issue 2)*. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Suwandi, S. (2022). Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan*

- Kebudayaan, 14(70), 4–62.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i70.3220>
- Turambi, K., Budiarmo, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197.
<https://doi.org/10.58784/rapi.150>
- Ulfah, S. M. U., Maryani, N., & Indra, S. (2024). Inventarisasi sarana dan prasarana sebagai upaya optimalisasi pengelolaan barang di pesantren tahfizh al-qur'an dan bahasa arab bina madani putri Bogor. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(3), 239-247.
- Utami, P., Chiar, M., & Sukmawati. (2016). Manajemen Pembiayaan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 1(1), 1–13.
- Utomo, F. A. A. (2024). Implementasi Penggunaan APBD Tahun 2021 Sebesar 20 Persen di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 63–73.
<https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11326>
- Viktoria, T. (2015). Transparency and Accountability in The Education Fund Management in SMK Muhammadiyah Prambanan. *E-Journal Jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika*, 4(4), 284–290.
<https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/mekatronika/article/view/2704>
- Waruwu, H., Togatorop, D., Amelia, I., Berutu, J., & Manullang, T. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Parmaksian. *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(5), 1548–1559.